LAPORAN AKHIR PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAT YANG DIAJUKAN KE DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN HUKUM BAGI WARGA HUNTARA KORBAN TSUNAMI KECAMATAN PANIMBANG, BANTEN

Penyuluh:

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn (Ketua)
Yuwono Prianto, S.H., M.H (Anggota)
Viator Harlen Sinaga, S.H., M.H (Anggota)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Pelatihan Kewirausahaan Hukum Bagi Warga Huntara Korban Tsunami Kecamatan Panimbang, Banten Nama Mitra PKM : Kecamatan Panimbang 3. Ketua Tim Pengusul: a. Nama Lengkap : Dr. Benny Djaja S.H., S.E., M.Hum., M.Kn b. Jenis Kelamin : Laki-Laki NIP C. : 0308056302 Jabatan Suktural d. : Lektor e. Jabatan Fungsional Fakultas / Jurusan : Hukum g. Alamat Surat : Perumahan Citra 2 Blok L3/12, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, 11830 h. Telepon / Fax : 089993330513 E-Mail i. : notaris.bennydjaja@gmail.com 4. Anggota Tim PKM a. Jumlah Anggota : 2 Dosen b. Nama Anggota I / Keahlian : Yuwono Prianto, S.H., M.H c. Nama Anggota II / Keahlian : Viator Harlen Sinaga, S.H., M.H d. Nama & NIM Mahasiswa a) Narumi Bungas Gazali 205170042 b) Eddy Suntoso 205160265 c) Endison Raylindo 205180009 5. Lokasi Kegiatan Mitra: a) Wilayah Mitra b) Kabupaten / Kota : Kecamatan Panimbang c) Provinsi : Banten d) Jarak Peta / Lokasi Mitra : 172 Km 6. Luaran yang Dihasilkan : Jurnal Nasional

Jakarta, 20 Agustus 2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

8. Biava Total

Ketua Penyuluh,

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

NIP: 10291010

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn

NIP: 0322086307

Mengetahui,

: Maret - Juni 2020

Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat

Jap Tji Beng, PhD NIP: 100381047

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	10
SOLUSI PERMASALAHAN	10
BAB III	
METODE PELAKASANAAN	13
BAB IV	14
LUARAN & TARGET CAPAIAN	14
BAB V	15
ANGGARAN & JADWAL	
DAFTAR PUSTAKA	
IDENTITAS PENYULUH	iv

A. RINGKASAN

Bencana alam yang terjadi sering dipahami sebagai apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar mengenai pengalaman emonsional terhadap kejadian yang menimpa hidup mereka. Bencana Tsunami Selat Sunda 2018 silam menimbulkan kerugian dan perubahan terhadap sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Stigma tertolak & terpuruk yang dimiliki oleh para korban pasca tsunami memerlukan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Hunian sementara yang didirikan belum cukup membantu masyarakat untuk keluar dari keterpurukan pasca Tsunami. Minimnya keahlian yang dimiliki dilur sektor pariwisata dan kelautan membuat masyarakat tidak dapat bersaing dalam dunia ekonomi sehingga dibutuhkan suatu pelatihan dalam bidang kewiraushaan guna membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Huntara Kecamatan Panimbang pasca terjadinya tsunami.

Kata Kunci : Korban Tsunami, Huntara, Kewirausahaan

B. SUMMARY

Natural disasters that occur are often understood as what is felt by the surrounding community regarding the emotional experience of events that have befallen their lives. The 2018 Sunda Strait Tsunami caused losses and changes to the socioeconomy of the local community. The rejection & decline of stigma held by the victims after the tsunami requires the attention of the government and the community. Temporary shelters that were established were not enough to help the community to get out of the aftermath of the Tsunami. The lack of expertise possessed by the tourism and maritime sector sector made the community unable to compete in the economic world so training is needed in the field of entrepreneurship to help improve the economic conditions of the people of Panara Subdistrict Panimbang after the tsunami. Keywords: Tsunami Victims, Huntara, Entrepreneurship

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana alam yang telah terjadi berulang kali membuat manusia terbiasa dengan bencana dan seolah melupakan sikap penaggulangan akan bencana. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif seperti Gunung Merapi di Yogyakarta, letusan Gunung Anak Krakatau di Banten, dan wilayah-wilayah lain di Indonesia lainnya. Berbagai bencana alam yang menyelimuti Indonesia beberapa bulan terakhir ini menyebabkan angka korban jiwa yang tidak sedikit serta memberikan dampak pada perkonomian nasional dikarenakan kerusakan-kerusakan infrastruktur yang di derita oleh para korban.

Indonesia menjadi daerah paling aktif secara seismik dikarenakan terletak pada Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*), jalur gempa Sabuk Alpide, serta di atas beberapa lempeng tektonik. Tingginya aktivitas aktivitas tektonik menyebabkan bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi kerap terjadi di Indonesia.Indonesia memilik 129 gunung api aktif yang beberapa di antaranya pernah meletus dan memberikan dampak

yang besar terhadap dunia seperti pada saat Gunung Krakatau meletus pertama kalinya pada tahun 1883.¹

Gempa Bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. ² Tsunami merupakan serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut karena gempa bumi. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti ombak lautan. *Tsu* berarti lautan & *nami* berarti gelombang ombak. ³ Bencana alam yang telah terjadi berulang kali membuat manusia terbiasa dengan bencana dan seolah melupakan sikap penaggulangan akan bencana. ⁴ Secara prespektif sosiologis, bencana sering dipahami sebagai apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar mengenai pengalaman emonsional terhadap kejadian yang menimpa hidup mereka. Pengelolaan bencana alam yang masih bersifat reaktif membuktikan bahwa faktor yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana merupakan pilihan kebijakan dan bukanlah hal yang wajib diadopsi untuk diimplementasikan. ⁵ Kondisi geografis Indonesia yang

¹

¹ Anonim, Memahami Cincin Api Pasifik Alasan Indonesia Rawa Gempa dan Tsunami https://kumparan.com/kumparansains/memahami-cincin-api-pasifik-alasan-indonesia-rawan-gempa-dan-tsunami-1533295225512258121

² Arief Mustofa Nur, "Gempa Bumi, Tsunami, dan Mitigasinya", *Jurnal Geografi, Vol. 7, No.1, Januari 2018,* hal. 67-68

³ BNPB, Definisi & Jenis Bencana, https://bnpb.go.id/home/definisi

⁴ Sulaiman, *Rekontruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta; 2017, Calpulis), hal. 5

⁵ Rohani Budi Prihatin, "Masyarakat Sadar Bencana: Pembelajaran Dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.9, No.2, Desember 2018,* hal. 223

rawan akan bencana tidak selaras dengan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana & pemulihan pasca bencana yang terbilang rendah.

Banyak pihak yang terdorong untuk meningkatkan edukasi dan mitigasi bencana pada masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana dengan tujuan meningkatkan pengetahuan & kesiapan masyarakat akan upaya penyelamatan diri & pemulihan pasca terjadinya bencana alam. Pemulihan pasca terjadinya bencana alam tidak hanya terfokus pada pemulihan psikis para korban seperti menghilangkan rasa trauma, tetapi juga memfokuskan pemulihan pada pemulihan kondisi sosial ekonomi para korban.

Tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada 2018 silam merupakan salah satu bencana alam yang menimbulkan kerugian terutama dalam perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Wilayah paling terdampak Tsunami Selatn Sunda adalah Kabupaten Pandgelang yang terdiri dari kawasan wisata dan pemukiman sepanjang Pantai Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Panimbang, dan Carita. Masyarakat pesisir Kecamatan Panimbang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan bergantung pada sektor pariwisata. Pasca terjadinya bencana, sektor pariwisata & ekonomi di Kecamatan Panimbang mulai mengalami kelesuan. Banyak rumah warga, penginapan, fasilitas umum yang hancur, kapal-kapal nelayan yang hancur atau terbawa oleh arus akibat diterjang tsunami membuat penduduk kehilangan matapencaharian mereka.

⁶ https://www.tribunnews.com/section/2018/12/23/kabupaten-pandeglang-wilayah-terparah-yang-terkena-dampak-tsunami-banten

Berdasarkan data yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari Perimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), diperkirakan nilai kerugian hotel terdampak bencana Tsunami Selat Sunda mencapai Rp 500 Miliar. Pada daerah Tanjung Lesung, kerugian yang diderita ditaksir sebesar Rp 180 Miliar. Kerugian tersebut hanya sebatas perhitungan akan kerusakan hotel yang terdampak dan belum ditambahkan dengan kerugian tamu hotel yang membatalkan penyewaan kamar hotel.⁷

Data terhadap kerusakan yang diderita terhadap sarana prasarana yaitu 1.296 rumah, 78 penginapan dan warung, 434 perahu dan kapal, 69 kendaraan roda empat, 38 kendaraan roda dua, satu dermaga, dan satu shelter. Berdasarkan penelusuran team beberapa waktu terkait, terdapat perubahan tren wisata pasca terjadinya tsunami. Wisatawan cenderung berlibur hanya dalam waktu yang singkat dan umumnya cenderung enggan untuk menginap.

Bencana membawa dampak kerusakan namun wajib dilakukan pemulihan dari situasi pasca bencana. Terdapat dua jenis pemulihan psca bencana yaitu kegiatan pasca bencana jangka pendek (Short Term Post Disaster Activities) & kegiatan pasca bencana untuk jangka panjang (Long Term Disaster Activities). Short Term Post Disaster Activities berupa penyediaan temporary shelter, makanan, pertolongan dan perawatan pertama setelah hunian semi permanen.

 $^{^{7} \}underline{\text{https://kabar24.bisnis.com/read/20181228/15/873702/kerugian-hotel-di-banten-akibat-tsunami-selat-sunda-ditaksir-capai-rp500-miliar}$

Long Term Disaster Activities bertujuan untuk mengembalikan seluruh aspek ke kondisi awal atau mengembalikan ke kondisi yang lebih baik sebelum terjadinya bencana yang berupa kegiatan pemulihan yang penting bagi sistem kehidupan (vital life support system) seperti pendidikan, kesehatan, dan pemulihan pada sektor ekonomi. Pada masa post disaster, masyarakat kerap mengalami perasaan treated unequally, discriminated, dan atau disengaged.

Stigma tertolak & terpuruk yang dimiliki oleh para korban pasca tsunami memerlukan kehadiran pemerintah di dalamnya agar dapat membantu mereka keluar dari keterpurukan. Diperlukan suatu koordinasi yang berjalan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat pada kondisi pasca bencana. Pemerintah dalam hal ini telah memberikan bantuan kepada para korban Tsunami Selat Sunda silam berupa pemberian sembako, bantuan obat-obatan, ganti rugi atas kerusakan yang diderita, dan termasuk di dalamnya mendirikan hunian sementara bagi para korban tsunami paling terdampak.

Huntara ditujukan bagi mereka yang mengalami kerusakan rumah dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Dari 10 Kecamatan terdampak Tsunami Selat Sunda di Banten (Carita, Panimbang, Sumur, Labuan, Menes, Cibaliung, Jibur, Cimanggu, Pagelaran dan Cigeulis), pembangunan huntara dilakukan pada Kecamatan Panimbang. Pembangunan huntara yang jauh dari keramaian membuat para pengungsi kesulitan

⁸ Trie Agustiyo, "Fungsi Kelompok Usaha Dalam Kegiatan Ekonomi Pasca Bencana Di Pangandaran", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22, No.2, Agustus 2011,* hal. 98

untuk mencari nafkah. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh team beberapa waktu silam, kondisi warga huntara Kecamatan Panimbang saat ini masih mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah bersifat tidak menentu sedangkan para penghuni huntara belum dapat kembali ke kondisi ekonomi yang stabil seperti sebelum bencana tsunami terjadi.

Pasca tsunami menerjang, warga kehilangan seluruh harta benda yang dimilikinya, hanya pakaian yang menempel di badan yang menjadi harta mereka satusatunya. Banyak nelayan yang kehilangan kapal akibat gelombang tsunami yang menghantam membuat beban keterpurukan ekonomi pasca tsunami semakin bertambah mengingat masyarakat setempat menggantungkan hidupnya pada hasil laut.

Masyarakat masih belum mampu untuk bangkit dari keterpurukan kondisi ekonomi pasca tsunami. Bencana Tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada 2018 silam memberikan dampak yang berarti dalam perubahan sosial ekonomi di kalangan masyarakat yang bermukim di sekitar daerah terdampak tsunami. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan pada jaringan kekerabatan pada kegiatan masyarakat, pendapatan serta kepemilikan rumah tangga.

-

⁹ Qaiyim Asy`ari, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor, dan Kekeringan di Pamekasan 2007)", *Journal of Management and Accounting, Vol. 1, No.2, Oktober 2018,* hal. 157

Minimnya keahlian yang dimiliki diluar sektor kelautan membuat masyarakat setempat tidak dapat bersaing diluar dari sektor pariwisata dan kelautan. Masyarakat kurang mampu melihat peluang bisnis dari lokasi huntara yang mereka tempati dewasi ini. Lokasi huntara yang berada di Kecamatan Panimbang merupakan lokasi strategis yang sering dilalui oleh para wisatawan baik bagi mereka yang hanya sekedar pulang hari maupun menginap sejatinya dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut maka sektor usaha yang paling dimungkinkan untuk membantu mengangkat masyarakat huntara dari keterpurukan ekonomi pasca bencana tsunami selat sunda adalah mengembangkan semangat kewiraushaan dalam bidang kuliner melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sektor wirausaha mewajibkan para pelakunya untuk terlebih dahulu memilih bisnis yang mempunyai nilai manfaat & memiliki inovasi yang kuat dalam menjalankan usahanya.

Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang dan selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif yang mmapu membawa bisnis terus bertumbuh serta memiliki nilai. Kewirausahaan merupakan proses dinamis untuk menciptakan nilai tambah atas barang, jasa, dan kemakmuran. Ide merupakan modal utama yang akan membentuk dan mendukung modal lainnya. Inovasi yang dimiliki oleh seorang pengusaha berkaitan erat dengan unsur kebaruan

(*novelty*) dan perbaikan (*improvement*). Nilai kebaruan tidak terbatas pada menciptakan sebuah produk baru saja, melainkan juga mencakup pada segi nilai guna dan pengaplikasiannya.¹⁰

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus mempunyai itikad baik, santun, serta beretika bisnis yang baik. UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomiaan di Indonesia dimana telah menyerap 96% tenaga kerja dan berkontribusi dalam 60% PDB (Produk Domesrik Bruto). UMKM memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang sudah terbukti sewaktu masa-masa krisis silam UMKM lebih tangguh dalam menghadapi realita tersebut. 13

Hasil penelusuran lapangan menunjukan bahwa hingga saat ini masyarakat huntara belum melihat adanya peluang dalam mengambangkan UMKM kuliner. UMKM pada bidang kuliner sejatinya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pada bidang kuliner umumnya mengembangkan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Pada lingkungan sekitar kawasan huntara banyak terdapat rumah makan yang dibangun tetapi produk makanan yang dijual bukanlah makanan

_

¹⁰ Rintan Saragih, "Membangun Usaha Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial", *Jurnal Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, Desember 2017*, hal. 26-28

¹¹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis,* (Jakarta ; 2009, Mitra Wacana Media) , hal. 88

¹² Angling Adhitiya Purbaya, *Masalah UMKM di RI: Minim Melek Teknologi hingga Sulit Akses Modal* https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4464791/masalah-umkm-di-ri-minim-melek-teknologi-hingga-sulit-akses-modal

¹³ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol.6, No.1, Januari 2017*, hal. 55

tradisional khas wilayah tersebut. Makanan khas Banten, khususnya wilayah Kecamatan Panimbang belum memiliki peranan berarti dalam wisata kuliner di Kecamatan Panimbang, Banten. Masyarakat setempat cenderung hanya menjadi pekerja pada bidang kuliner di wilayah Kecamatan Panimbang sehingga belum memegang kunci posisi pada sektor industri tata boga ini.

Oleh karena itu team berinisiatif untuk melakukan pelatihan guna menggali potensi-potensi masyarakat setempat pada sektor kuliner tradisional dan memulihkan keadaan ekonomi pasca terjadinya Tsunami Selat Sunda 2018 silam. Pengembangan kewirausahaan yang dipilih adalah wisata kuliner yaitu suatu bentuk wisata dimana para wisatawan yang berkunjung tidak hanya menikmati keindahan alam yang terdapat di Kecamatan Panimbang, tetapi juga merasakan kelezatan kuliner tradisional masyarakat setempat.

Masyarakat huntara Kecamatan Panimbang akan membangun, mengelola, dan melayani sendiri dalam UMKM bidang kuliner ini dan mendapat keuntungan langsung dari wisatawan yang datang untuk menikmati kelezatan serta kekhasan kuliner di Kecamatan Panimbang.Berdasarkan paparan tersebut maka judul pengabdian kepada masyarakat yang akan diangkat adalah "PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN HUKUM BAGI WARGA HUNTARA KORBAN TSUNAMI KECAMATAN PANIMBANG, BANTEN".

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

Rendahnya kualias SDM masyarakat Huntara Kecamatan Panimbang pada sektor kewirausahaan berdampak lambatnya pemulihan eknomi pasca terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda 2018 silam. Keduduk Kecamatan Panimbang sebagai jalan nasional penghubung dengan wisata Tanjung Lesung menjadikannya ramai dilalui oleh para wisatawan. Warga Huntara Kecamatan Panimbang belum memanfaatkan peluang kewirausahaan pada bidang kuliner melalui UMKM.

Sepanjang jalan banyak dijumpai rumah makan yang berdiri kokoh tetapi bukan merupakan makanan khas dari Kecamatan Panimbang ataupun makanan khas daerah Banten. Sektor kewirausahaan kuliner diramaikan oleh para pendatang yang umumnya berasal dari Jawa maupun Sumatera. Masyarakat setempat mayoritas hanya menjadi pekerja pada industry rumah makan di Kecamatan Panimbang dan belum menjadi pelopor industri kuliner khas Kecamatan Panimbang.

Kondisi ekonomi dan mental yang belum stabil pasca bencana Tsunami Selat Sunda 2018 silam menjadikan penghalang bagi warga Huntara Kecamatan Panimbang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Lokasi Kecamatan Panimbang yang merupakan tempat transit wisata mendorong masyarakat agar dapat melihat peluang wirausaha yang ada dengan meningkatkan kualita SDM.

Melalui pelatihan yang diberikan oleh team, diharapkan penduduk setempat memiliki keterampilan untung menunjang kegiatan usaha yang ada. Salah satu keahlian yang wajib dimiliki oleh masyarakat Huntara Kecamatan Panimbang adalah keterampilan dalam berwirausaha seperti menjalankan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Kegiatan UMKM yang dijalankan dapat berupa kegiatan usaha dalam bidang kuliner, kerajinan tangan, ataupun kebudayaan khas yang dimiliki oleh Kecamatan Panimbang.

Keterampilan & inovasi merupakan faktor utama yang wajib dimiliki oleh setiap individu dalam menjalankan kegiatan usaha khsusunya dalam bidang UMKM dimana persaingan usaha mewajibkan para pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi agar mampu bersaing dengan para kompetitor. Seperti yang kita ketahui, wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Panimbang tidak hanya berasal dari wisatawan lokal tetapi banyak dari para wisatawan yang berkunjung merupakan wisatawan mancanegara yang dalam hal ini ingin menikmati keunikan serta cita rasa kuliner yang menjadi ciri khas masyarakat Kecamatan Panimbang.

Melihat contoh pentingnya keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut di atas tentunya dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan minimnya keterampilan yang dimiliki oleh penduduk lokal pada Kecamatan Panimbang yang menjadi transit wisata menimbulkan kerugian yang terbilang besar bagi

pendapatan & kesejahteraan desa tersebut terlebih mengingat kondisi ekonomi & psikis yang belum stabil pasca Tsunami Selat Sunda 2018 silam.

Pelatihan kewirausahaan yang akan dilangsungkan oleh tim bermaksud agar meningkatkan pengetahuan hukum dan pemahaman warga Huntara Kecamatan Panimbang terhadap berbagai regulasi dan pengetahuan umum mengenai UMKM bidang kuliner & jasa pariwisata. Dalam hal ini tim memfokuskan pelatihan kepada warga Huntara Kecamatan Panimbang khususnya remaja, pemuda, dan kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas usaha jasa kuliner & kepariwisataan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia serta memberikan pemahaman tentang sumber daya alam wilayah yang bersangkutan

BAB III

METODE PELAKASANAAN

Pada awalnya metode sosialisasi aspek hukum kewirausahaan bagi masyarakat Huntara

Kecamatan Panimbang meliputi bidang:

- a. Hukum Bisnis
- b. Hukum Perlindungan Konsumen
- c. Usaha Sekor Pariwisata
- d. Latihan Pembuatan UMKM
- e. Service Excellent

Berkenaan dengan mewabahnya Covid-19 di tanah air yang berasal dari China, akibat hubungan internasional melalui penerimaan tenaga kerja asing dalam rangka penanaman modal di Indonesia maupun lalu lintas orang Indonesia ke Mancanegara, disepakati oleh tim bahwa bidang yang disampaikan kepada warga serta sosialisasi aspek kewirausahaan hukum hanya meliputi bidang hukum bisnis, hukum perlindungan konsumen, dan usaha sektor pariwisata. Sementara materi tentang latihan pembuatan UMKM dan Service Excellence ditiadakan.

Metode penyampaian yang akan dilakukan melalui:

- a. Ceramah & Tanya Jawab
- b. Tugas Kelompok
- c. Simulasi
- d. Team Building

Demikian juga dengan metode penyampaiannya hanya melalui Ceramah dan Tanya Jawab, metode tugas kelompok, simulasi, dan tim building ditiadakan berkenaan dengan diberlakukannya protokol oleh Pemerintah atas terjadinya wabah Pandemi Covid-19. Dalam kesempatan tersebut, tim juga bekerjasama dengan komunitas Assyroth di lingkungan perumahan Vila Ilhami, Kota Tangerang yang mendukung memberikan bantuan alat dan bahan

sanitasi serta 468 buku yang terdiri atas:

- 1. Buku Keagamaan dan Kitab Suci
- 2. Buku Ilmu Pengetahuan Populer
- 3. Buku Keterampilan
- 4. Buku Novel
- 5. Kamus

Di samping itu juga disalurkan qurban berupa seekor kambing dari Paksi Yudha Sasmita, warga perumahan Vila Ilhami untuk diserahkan kepada warga Huntara, Kecamatan Panimbang yang secara kebetulan pelaksanaan kegiatan berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dari tim disampaikan bantuan berupa berbagai macam kebutuhan makanan dan minuman yang ditunjukkan bagi para bbayi, balita, anak-anak, dan manula, khususnya juga kepada warga Huntara secara keseluruhan. Maupun bantuan alat dan bahan sanitasi untuk mendukung ketentuan protokol Covid-19, sehingga warga secara preventif dapat menghindari atau mencegah tertular Covid-19.

BAB IV

LUARAN & TARGET CAPAIAN

Luaran kegiatan ini berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai potret aktivitas ekonomi pasca tsunami yang dilakukan oleh warga huntara di Kecamatan Panimbang, Banten dalam mengantisipasi fluktualisasi ekonomi pasca terjadinya Tsunami Selat Sunda. Target capaian adalah terbentuknya inisiasi kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kalangan warga Huntara di Kecamatan Panimbang, Banten.

Berkenaan dengan Pandemi Covid-19, tim juga berupaya agar warga Huntara memiliki kesadaran untuk mencegah meluasnya Pandemi di kalangan warga sekitar melalui penerapan protokol Covid yang sarananya telah disampaikan kepada mereka untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Di samping itu, tim juga berusaha mendorong warga untuk mengikuti 2 orang warga Huntara yang sudah memulai menjalankan usaha mikro kuliner dengan memanfaatkan berbagai bantuan alat kerja yang sudah pernah diberikan oleh tim lain, sehingga materi yang diberikan bersinergi dengan upaya pemberdayaan warga Huntara yang pernah diberikan oleh tim lain pada beberapa waktu yang lalu.

BAB V

ANGGARAN & JADWAL

1. Survei lokasi dan koordinasi awal	Rp. 1.500.000,-		
2. Cetak, Jilid, Print, Foto Copy Proposal,	Rp 500.000,-		
Bahan Monev & Laporan Akhir			
3. Pembelian ATK	Rp. 250.000,-		
4. Pembuatan Spanduk	Rp. 400.000,-		
5. Transportasi Pembicara dan Tim	Rp. 3.000.000,-		
6. Penginapan (2x4xRp 400.000,-)	Rp 3.200.000,-		
7. Sewa Kendaraan (2x Rp. 600.000,-)	Rp 1.200.000,-		
8. Konsumsi :			
a. Pembicara dan Tim (6 x 9 x Rp 25.000)	Rp 1.350.000,-		
b. Peserta			
1) Snack (4 x 50 x Rp. 10.000,-)	Rp 2.000.000,-		
2) Makan siang (2x50x Rp 25.000,-)	Rp 1.500.000,-		
3) Rapat Tim (2x7x Rp 25.000,-)	Rp 350.000,-		
9. Penggandaan Materi Workshop Rp 500.000			
10. Pengadaan Kaos untuk POKDARWIS (50x Rp. 80.000,-) Rp. 4.000.000,-			
11. Bantuan Alat Kerja/Usaha Rp 2.500.000,-			
12. Honorarium			
a. Pembicara (3x Rp 1.000.000,-) Rp 3.000.000,-			
b. Mahasiswa (3x Rp 300.000,-) Rp 600.000,-			
c. Petugas Keamanan & Kebersihan (3x2xRp 300.000,-) Rp 1.800.000,-			
13. Cinderamata (3x Rp 350.000,-) Rp 1.050.000,-			

Total Rp. 28.700.000,-

Terbilang (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Catatan:

Dari besaran yang diajukan tersebut di atas, tim hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 8.000.500,-yang terbagi dalam 2 termin, sehingga tim mengalami kesulitan untuk menjalankan program yang sudah direncanakan. Namun demikian, keterbatasan dana tersebut dapat di "cover" dengan adanya kerjasama dengan pihak ke-3 yaitu Komunitas Assyroth dan juga perorangan yang bergabunng.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Santiago, Faisal, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta ; 2009, Mitra Wacana Media)

Sulaiman, Rekontruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia, (Yogyakarta ; 2017, Calpulis)

B. Jurnal

- Agustiyo, Trie, "Fungsi Kelompok Usaha Dalam Kegiatan Ekonomi Pasca Bencana Di Pangandaran", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22, No.2, Agustus 2011*
- Asy'ari, Qaiyim, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor, dan Kekeringan di Pamekasan 2007)", Journal of Management and Accounting, Vol. 1, No.2, Oktober 2018
- Nur, Arief Mustofa, "Gempa Bumi, Tsunami, dan Mitigasinya", *Jurnal Geografi, Vol. 7, No.1, Januari 2018*
- Prihatin, Rohani Budi, "Masyarakat Sadar Bencana: Pembelajaran Dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.9, No.2, Desember 2018*
- Saragih, Rintan, "Membangun Usaha Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial", *Jurnal Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, Desember 2017*
- Suci, Yuli Rahmini, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol.6, No.1, Januari 2017*

C. Internet

Anonim, Memahami Cincin Api Pasifik Alasan Indonesia Rawa Gempa dan Tsunami https://kumparan.com/kumparansains/memahami-cincin-api-pasifik-alasan-indonesia-rawan-gempa-dan-tsunami-1533295225512258121

BNPB, Definisi & Jenis Bencana, https://bnpb.go.id/home/definisi
<a href="https://www.tribunnews.com/section/2018/12/23/kabupaten-pandeglang-wilayah-terparah-yang-terkena-dampak-tsunami-banten-https://kabar24.bisnis.com/read/20181228/15/873702/kerugian-hotel-di-banten-akibat-tsunami-selat-sunda-ditaksir-capai-rp500-miliar

Angling Adhitiya Purbaya, *Masalah UMKM di RI: Minim Melek Teknologi hingga Sulit Akses Modal* https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4464791/masalah-umkm-di-ri-minim-melek-teknologi-hingga-sulit-akses-modal

JUSTIFIKASI ANGGARAN

1. Survei lokasi dan koordinasi awal	Rp. 1.500.000,-
2. Cetak, Jilid, Print, Foto Copy Proposal,	Rp 500.000,-
Bahan Monev & Laporan Akhir	
3. Pembelian ATK	Rp. 250.000,-
4. Pembuatan Spanduk	Rp. 400.000,-
5. Transportasi Pembicara dan Tim	Rp. 3.000.000,-
6. Penginapan (2x4xRp 400.000,-)	Rp 3.200.000,-
7. Sewa Kendaraan (2x Rp. 600.000,-)	Rp 1.200.000,-
8. Konsumsi:	
a. Pembicara dan Tim (6 x 9 x Rp 25.000)	Rp 1.350.000,-
b. Peserta	
c. Snack (4 x 50 x Rp. 10.000,-)	Rp 2.000.000,-
d. Makan siang (2x50x Rp 25.000,-)	Rp 1.500.000,-
e. Rapat Tim (2x7x Rp 25.000,-)	Rp 350.000,-
9. Penggandaan Materi Workshop	Rp 500.000,-
10. Pengadaan Kaos untuk POKDARWIS (50x Rp. 80.000,-)	Rp. 4.000.000,-
11. Bantuan Alat Kerja/Usaha	Rp 2.500.000,-
12. Honorarium	
d. Pembicara (3x Rp 1.000.000,-)	Rp 3.000.000,-
e. Mahasiswa (3x Rp 300.000,-)	Rp 600.000,-
f. Petugas Keamanan & Kebersihan (3x2xRp 300.000,-)	Rp 1.800.000,-
13. Cinderamata (3x Rp 350.000,-)	Rp 1.050.000,-
•	-

Total Rp. 28.700.000,-

Terbilang (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl.Bhayangkara No. 5 Pandeglang, Kode Pos 42213
Telp. (0253) 201403 Pesawat 10-32, Fax (0253) 203800 Pandeglang
www.pandeglangkab.go.id, email: setda@pandeglangkab.go.id

Pandeglang, 21 Februari 2020

Nomor Sifat 130/ /Y/- KSD/IX/ 2019

Penting

Lampiran Perihal

Kesediaan Kerjasama

Kepada,

Yth: REKTOR UNIVERSITAS TARUMANEGARA

di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat dari dekan Universitas Tarumanegara Jakarta, Nomor : 1098-D/FH-UNTAR/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, Perihal Permohonan kesediaan Kerjasama Kemitraan.

Berdasarkan pokok surat di atas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada prinsipnya menerima permohonan MoU dan kerjasama kemitraan dengan Universitas Tarumanegara, Dalam Hal Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk penyelenggaraan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Demikian surat ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

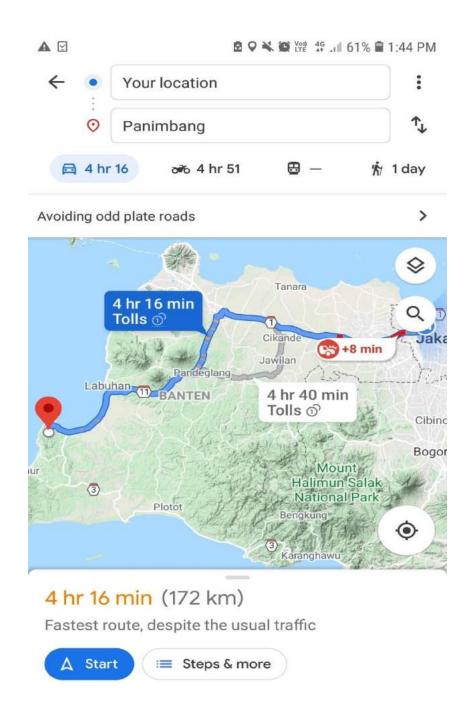
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Asisten Ekonomi Pembangunan,

Dra, Hi INDAH DINARSIANI, M. Pd Pelhabiha Utama Muda – IV/c NIP. 196101231986122001

Tembusan:

1. Bupati Pandeglang (Sebagai Laporan)

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang



IDENTITAS PENYULUH

1. Judul : Pelatihan Kewirausahaan Hukum Bagi Warga Huntara Korban

Tsunami Kecamatan Panimbang, Banten

2. Ketua Penyuluh :

a. Nama Lengkap : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn., M.M

b. JenisKelamin : Laki-Laki c. NIP 0322086307

d. JabatanStruktural :-

e. JabatanFungsional : Lektor f. Fakultas / Jurusan : Hukum

g. Alamat Surat : Perumahan Citra 2 Blok L3/12, Pegadungan, Kalideres,

Jakarta Barat, 11830

h. Telepon / Fax 089993330513

i. Email : notaris.bennydjaja@gmail.com

3. Anggota Penyuluh I

a. Nama Lengkap : Yuwono Prianto, S.H., M.H.

b. Jenis Kelaman :Laki-Laki
c. NIP 10288001
d. Jabatan Struktural : Lektor Kepala

e. Jabatan Fungsional : -

f. Fakultas/Jurusan : Hukum

g. Alamt Surat : Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta Barat

h. Telepon / Fax : 081316409969

i. E-mail : yuwonop@fh.untar.ac.id

4. Anggota Penyuluh II

a. Nama Lengkap : Viator Harlen Sinaga, S.H., M.H.

b. Jenis Kelaman :Laki-Laki

c NIP

d. Jabatan Struktural : Lektor

e. Jabatan Fungsional : -

f. Fakultas/Jurusan : Hukum

g. Alamt Surat

h. Telepon / Fax : 08129345352

i. E-mail :

5. Penyuluh

a. Narumi Bungas Gazali (205170042)

b. Eddy Suntoso

c. Endison Ravlindo













Log Book

No	Waktu	Keterangan
1.	Medio Feburari 2020	Pembentukan Tim
2.	Akhir Februari 2020	Penelusuran Dokumen
3.	Awal Maret 2020	Penyusunan Proposal
4.	Medio Maret 2020	Finalisasi Proposal
5.	Medio Maret 2020	Penyampaian Proposal
6.	Akhir Mei 2020	Penandatangan Perjanjian
7.	Awal Juli 2020	Koordinasi Lanjutan dengan Tim
8.	30 Juli 2020	Pelaksanaan Kegiatan
9.	04 Agustus 2020	Penyusunan Draft Laporan PKM
10.	05 Agustus 2020	Penyampaian Laporan Kemajuan PKM





PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN HUKUM BAGI WARGA HUNTARA KORBAN TSUNAMI KECAMATAN PANIMBANG, BANTEN



Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn

Yuwono Prianto, S.H., M.H,

Viator Harlen Sinaga, S.H., M.H.



Rumusan Masalah

1

Apa yang dapat dilakukan oleh Warga Huntara untuk bangkit kembali secara materi?

2

Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum apa saja yang dapat dibuat oleh Warga Huntara agar dapat melakukan kegiatan usaha?



Warga Huntara yang merupakan korban tsunami Kecamatan Panimbang, Banten mengalami banyak kerugian baik itu materiil maupun immateriil. Mereka harus bangkit kembali secara mental maupun materi, sebagai berikut:



1.Secara Mental

Warga Huntara harus bangkit kembali dengan tegar menerima kenyataan, jangan berlarut-larut dalam kesedihan, dan selalu positif. Tidak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan karena tidak dapat membalikkan keadaan semula. Masa lalu yang telah terjadi tidak dapat diubah, tapi masa depan dapat diubah dengan usaha sendiri.

Untuk dapat mengubah masa depan, harus dimulai dari mental yang kuat dan positif. Tentu saja diikuti dengan iman dan ibadah kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing.



2.Secara Materi

Warga Huntara harus berhemat karena telah mengalami banyak kerugian. Halaman atau tanah sekitar rumah dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, dari sayuran, rempah-rempah, biji-bijian, hingga umbi-umbian.

Tumbuhan tersebut relatif cepat tumbuh, sehingga lumayan dapat membantu agar dapat berhemat namun kebutuhan pangan tetap terpenuhi.





Selain itu, Warga Huntara juga harus melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan uang yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha, dibutuhkan suatu badan usaha sebagai berikut:



Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum







Perusahaan Dagang (UD)

Perusahaan dagang merupakan badan usaha yang paling gampang dibuat karena pendiri hanya 1 (satu) orang sehingga tidak perlu dibuat Akta Pendiriannya di hadapan Notaris. Namun, jika kerja sama dengan perusahaan lain biasanya dibutuhkan Akta Pendirian beserta dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat di hadapan Notaris.

Firma

Firma didirikan oleh sekumpulan orang yang berprofesi sama untuk kegiatan komersial. Pendiri firma minimal 2 (dua) orang. Firma yang sering ditemukan adalah kantor hukum, kantor akuntan, kantor Notaris, dan dokter.

Persekutuan Komanditer (CV)

komanditer Persekutuan sebenarnya badan usaha semi Terbatas. Perseroan Hal dikarenakan ada pesero pasif yang tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang dimasukkan namun juga ada pesero aktif yang bertanggung jawab penuh sampai pribadinya. pada harta Persekutuan komanditer minimal didirikan oleh 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) pesero pemodal dan 1 (satu) pesero pengurus.

Badan Usaha Berbadan Hukum



Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum yang paling umum dibuat untuk kegiatan komersial dalam skala besar. Pendiri Perseroan Terbatas minimal 2 (dua) orang. Modal yang dimasukkan ke dalam Perseroan Terbatas akan dikonversikan menjadi saham. Organ Perseroan Terbatas ada 3 (tiga), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.



Koperasi

Koperasi harus didirikan oleh minimal 25 (dua puluh lima) orang Warga Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta berasaskan kekeluargaan. Uang yang dihasilkan dikelola bersama untuk kesejahteraan bersama para anggota koperasi yang tinggal di 1 (satu) area yang sama. Organ koperasi ada 3 (tiga), yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.



Yayasan

Yayasan sebenarnya tidak boleh bertujuan untuk mencari keuntungan, namun banyak disalahgunakan untuk mencari keuntungan dan menghindari pajak. Organ yayasan ada 3 (tiga), yaitu Pembina, Pengawas, dan Pengurus.





Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

dengan

Badan Usaha Berbadan Hukum

Subyek dan Permodalan

Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Subyek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya. Dengan demikian, badan usaha tersebut bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri atau pengurus. Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus.

Badan Usaha Berbadan Hukum

pendiriannya disahkan, Sejak maka subyek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri sebagai personifikasi orang badan hukum. Oleh sebagai karenanya, dia sendiri telah diakui sebagai badan hukum terpisah dari pendiri atau pemegang saham. Dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus atau direksi yang ditunjuk sesuai dengan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar.

Harta (permodalan)

Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Bercampur dengan harta kekayaan pendiri atau pengurus.

Badan Usaha Berbadan Hukum

Terpisah dari kekayaan para pendiri atau pengurus.

Prosedur Pendirian

Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Akta Notaris dan kemudian didaftarkan di Online Single Submission (OSS).

Badan Usaha Berbadan Hukum

Ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya.

Pertanggungjawaban

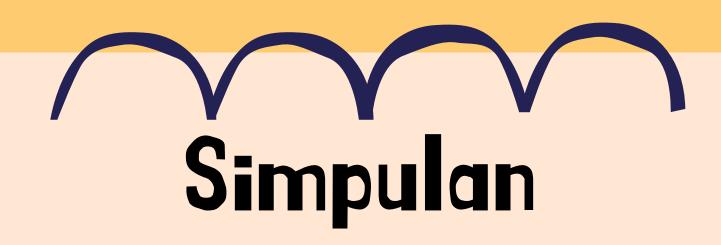
Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Pertanggungjawaban akan sampai harta pribadi pendiri atau pengurus tersebut, alias tidak ada pembatas.

Badan Usaha Berbadan Hukum

Pertanggungjawaban pendiri atau pemegang saham terhadap perikatan yang dibuat antara badan usaha berbadan hukum dengan pihak ketiga sebatas modal yang dimasukkan ke dalam badan usaha berbadan hukum tersebut.

Semua badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum di atas, kecuali perusahaan dagang wajib membuat Akta Pendiriannya di hadapan Notaris, selaku pejabat pembuat akta autentik yang kekuatan pembuktiannya dipersamakan dengan putusan pengadilan di mata hukum.



Warga Huntara dapat bangkit kembali secara materi dengan berhemat dan melakukan kegiatan usaha.

Badan usaha yang dapat dibuat untuk melakukan kegiatan usaha ada 2 (dua) macam, yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum.

Badan usaha tidak berbadan hukum terdiri dari perusahaan dagang, firma, dan persekutuan komanditer sedangkan badan usaha berbadan hukum terdiri dari perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.

Badan usaha yang direkomendasikan adalah perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas.



Terima Kasih!

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh: V. Harlen Sinaga, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANGARA

Pengaturan dan Perlunya Perlindungan konsumen

Pengaturan

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen

Perlunya Perlindungan konsumen

Perekonomian nasional menghasilkan barang/ jasa, yang memakaimasyarakat (konsumen) harus dilindungi

Pengertian Barang & Jasa

❖Barang

adalah baik benda berwujud/tidak berwujud, bergerak/tidak bergerak

⇔Jasa

adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi mayarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen

Pihak Utama

❖ Pelaku usaha

adalah Perorangan/badan hukum yang melakukan usaha/perekonomian di Indonesia

Konsumen

adalah pemakai jasa/barang untuk diri sendiri, orang lain, atau mahluk lain yang dapat dihabiskan/tidak dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen

Tujuan pengetahuan perlindungan konsumen

❖ Pelaku usaha dan Konsumen

Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan akses informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

Konsumen

- Meningkatkan kesadaran untuk melindungi diri
- Dapat menghindari ekses negatif dari pemakaian barang
- Kemampuan untuk memilih /barang jasa

Pelaku usaha:

 Agar tumbuh kesaaran akan pentingnya perlindungan agar jujur dan bertangggung jawab dalam menjalankan usaha

Konsumen dan Pelaku Usaha: Hak & Kewajiban

Hak Konsumen

- Dilayani secara jujur dan tidak diskrimatif
- Informasi mengenai barang/jasa yang dipilih
- Memilih barang/jasa sesuai dengan nilai barang/jasa
- Mendapatkan advokasi dalam perlindungan konsumen
- Mendapat kompenasi apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan perjanjian
- Nyaman, aman, dalam konsumsi barang

Kewajiban Konsumen

- Membaca petunjuk mengenai barang yang dibeli
- Itikad baik dalam pembelian
- Membayar sesuai dengan nilai tukar

Kewajiban Pelaku usaha:

- Melayani konsumen secara jujur dan tidak diskrimatif
- Memberikan Informasi mengenai barang/jasa yang dijual
- Menjamin mutu barang/jasa
- Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji

- Memberi kompensasi kepada konsumen apabila akibat pemanfaatan barang/jasa menimbulkan kerugian
- Memberi kompensasi kepada konsumen apabila akibat pemakaian barang barang/ jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

Larangan bagi pengusaha

- Pengusaha dilarang memperdagangkan barang/jasa:
 - Yang tidak sesuai dengan:
 - Berat berat barang/jasa dalam label
 - kondisi kondisi atau kemanjuran dibuat dalam label
 - ukuran, takaran yang dibuat dalam label
 - mutu, komposisi dibuat dalam dalam label

- tidak mencantumkan:
 - jangka waktu pemakaian
 - cara pemakaian barang
- tidak mengikuti mengikuti ketentuan halal sebagaimana dinyatakan dalam label
- tidak memasang label atau membuat penjelasan tentang namabarang/jasa, ukuran, isi, kompoisisi, aturan pakai,tanggal pemuatan, akibat samping, tanggal pembuatan, alamat pelaku

Pihak –pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen

Bentukan Pemerintah

- Pembina (Menteri teknis terkait)
- Pengawas (Menteri teknis terkait)
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional
 - Tugas:
 - ✓ Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah untuk penyusunan kebijakan
 - ✓ Melakukan penelitian dan pengkajian peraturan

- perundang-undangan
- Mendorong agar dilakukan penelitian terhadap barang /jasa yang menyangkut keselematan konsumen
- Mendorong LSM bidang perlidungan konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Di luar Pemerintah

- Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat
- Konsumen
- Pelaku Usaha

Trimakasih.....

USAHA KEPARIWISATAAN

Yuwono Prianto, S.H., M.H.

FAKTA YANG HARUS DISIKAPI

- Perubahan pertumbuhan ekonomi global
 - -Tahun 2015 hanya 0,2%
- Revolusi digital menyebabkan pengurangan karyawan bahkan kepailitan/ kebangkrutan perusahaan dengan akibat PHK MASSAL

FAKTA YANG HARUS DISIKAPI

 Pemanasan suhu bumi akibat polusi udara, pencemaran/ kerusakan lingungan dan pembakaran hutan akibat limbah industri, penambangan liar mengakibatkan

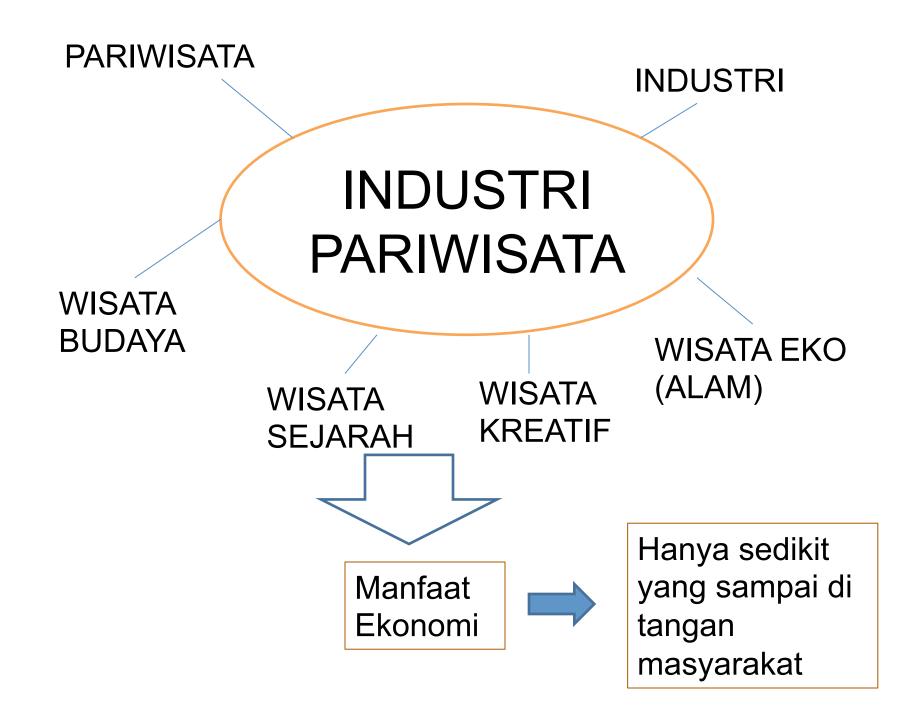
FAKTA YANG HARUS DISIKAPI

- Bertambahnya potensi konflik antar negara
 - Misalnya Claim China atas Laut China Selatan berdampak pada nelayan Philipina, termasuk klaim atas Pulau Natuna...?
- Radikalisme, Separatisme dan Terorisme, Neokapitalisme+Neo Liberalisme

Pariwisata sebagai kebutuhan dasar/HAM

Data: United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

- Pertumbuhan wisatawan internasional naik 5% pada tahun 2013 dengan jumlah lebih dari 1 miliar orang, wisatawan ke Asia Tenggara pada 2005-2012 adalah 8,3%, 2012 = 13%
- Sumbangan sektor pariwisata di ASEAN ±8-9% dari Produk Domestik Bruto (PDB)
- Asia Tenggara menyumbang 7,3%



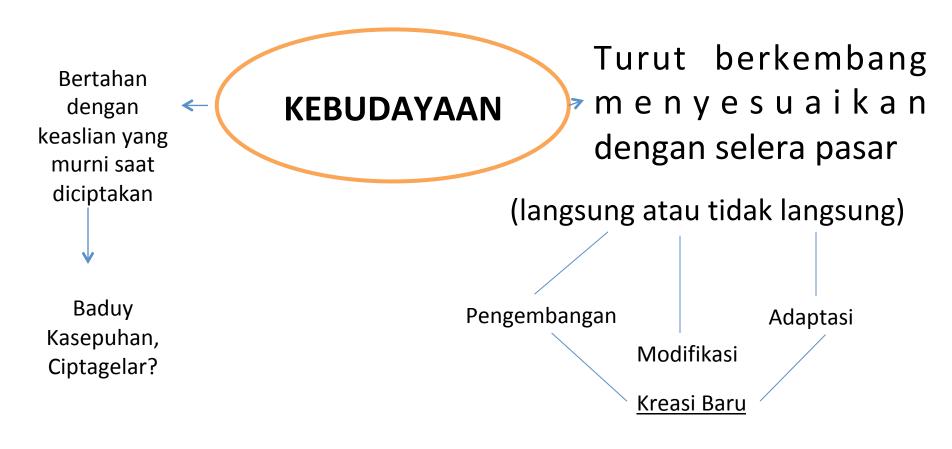
-> Budaya semestinya dilestarikan, karena mengandung:

- Nilai-nilai sosial budaya
- Nilai-nilai spiritual
- Nilai-nilai ilmiah
- Nilai-nilai intelektual
- Nilai-nilai edukatif
- Contoh: Bali dan Lombok





OPSI



- Ada penambahan bahan/ pengurangan
- Pengemasan baru
- Perubahan wujud/bentuk



Pelaku UMK kerap berkompetisi secara tidak sehat dan saling menjatuhkan. Seharusnya membangun kebersamaan dan berkolaborasi, membangun kualitas SDM agar semakin kreatif menciptakan nilai tambah.



Dasar Hukum: UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diperlukan 2% entrepreneur

Jumlah penduduk Indonesia 262 Juta

 $2/100 \times 262.000.000 =$ 5.240.000 orang

Yang ada sekarang sekitar 500.000 orang, masih diperlukan 4.740.000 orang entrepreneur untuk



Nilai dasar yang harus ditumbuhkembangkan:

- Mempunyai iktikad baik
- Santun
- Beretika bisnis yang baik
- Mempunyai keunggulan kompetitik
- Mempunyai keyakinan bahwa usahanya dapat tetap berkelanjutan

Potensi stimulant utama jasa

kepariwisataan

- Wisata alam
- Keunikan ekspresi budaya tradisional





Wisatawan jauh-jauh melakukan perjalanan demi untuk merasakan/mengalami sendiri sesuatu yang berbeda dari daerah asalnya.

Mereka membutuhkan kekhasan dari sebuah negara dalam segala aspeknya.

12 Unsur Kebudayaan yang menarik minat wisatawan datang berkunjung ke suatu negara/

daerah:

- 1. Bahasa
- 2. Tradisi Masyarakat
- 3. Kerajinan Tangan
- 4. Makanan dan kebiasaan makan
- 5. Musik dan kesenian
- 6. Sejarah suatu tempat
- Cara kerja dan teknologi
- 8. Agama yang dinyatakan dalam cerita

- atau sesuatu yang dapat ditafsirkan
- 9. Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata
- 10. Tata cara berpakaian penduduk setempat
- 11. Sistem pendidikan
- 12. Aktivitas pada waktu senggang

Unsur-unsur tersebut dikemas secara khusus untuk disajikan kepada wisatawan agar jadi lebih menarik.

Contoh Pariwisata budaya -> (populer di

Indonesia)

Kawasan wisata budaya pampang, 20 km dari Samarinda (antara Bontang & Samarinda).

Wisatawan diizinkan masuk ke rumah adat (Lamin), menyaksikan tarian dan upacara adat.



- 1. Atraksi (alam, budaya, dan ekonomi)
- 2. Akses yang dapat memudahkan wisatawan mencapai tujuan
- 3. Fasilitas (seperti akomodasi, katering, dan objek wisata dengan segala keanekaragaman jenisnya)
- 4. Hospitality (keramahtamahan) masyarakat destinasi.
- 5. Keamanan positivis pemerintah, berupa hukum positif yang melindungi pelaku kepariwisataan.
 - Kebijakan pemerintah, cara kerja & pelayanan birokrat



KATA KUNCI BISNIS KEPARIWISATAAN

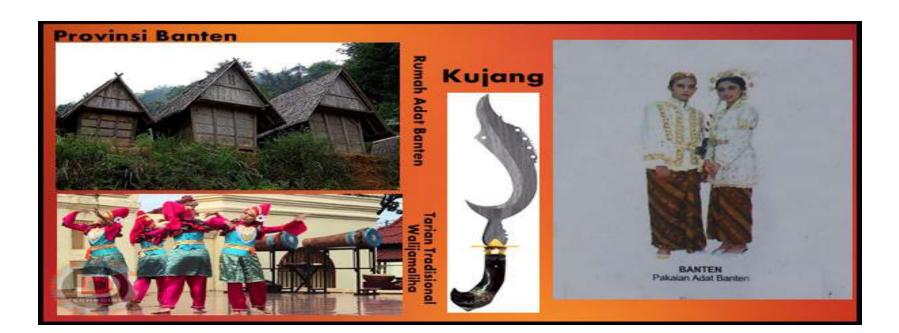
- Kepuasan Wisatawan
- Mutu Produk -> <u>branchwork</u>
- Pemeliharaan produk
- Word of Mouth (mulut ke mulut)





Pariwisata bergantung pada:

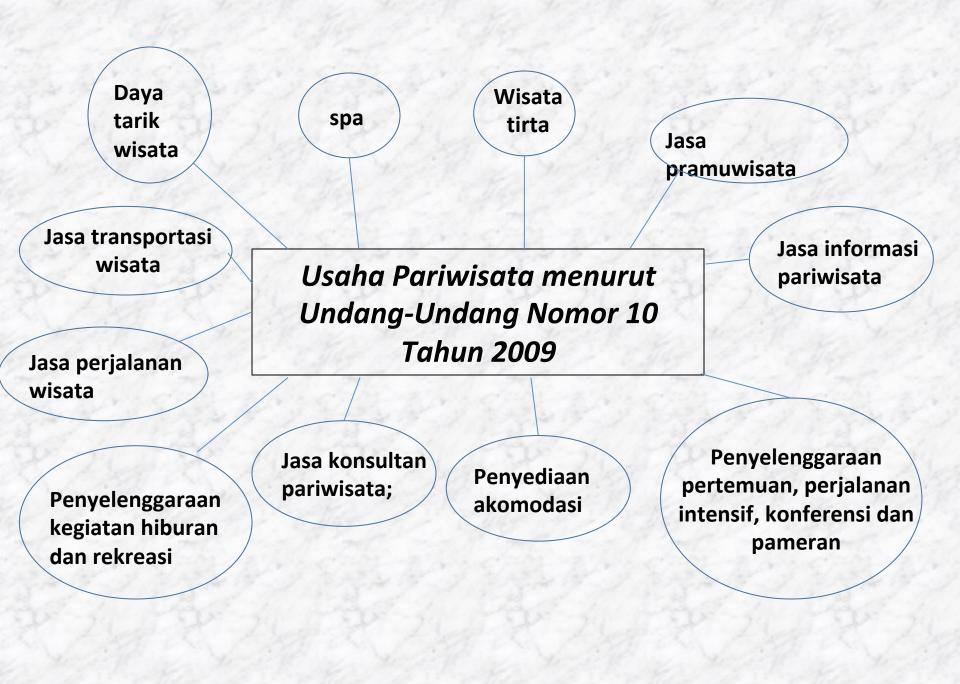
- Sumber Daya (alam, manusia, buatan)
- Kesadaran & Kepekaan (masyarakat dan pemerintah) terhadap isu-isu lingkungan.
 - Tidak merusak atau menurukan kualitas lingkungan (fisik maupun manusia)



Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)



- Ekspresi Fonetik/ Verbal, misal: cerita², babad, legenda, dsb.
- 2. Ekspresi Suara/ Musik, misal: lagu, musik instrumental, bunyi²an
- 3. Ekspresi Gerak/ Tindakan, misal: Tari²an, permainan, upacara, ritual, dsb.
- 4. Ekspresi Material/ Kebendaan, misal: kerajinan tangan, bangunan arsitektur, benda² spiritual, tempat² sakral.



Berwujud

Film, video fotografi

Tv dan Radio

Periklanan

Arsitektur

Desain

Teknologi Informasi

Permainan Interaktif

Penerbit dan Percetakan

Pasar barang seni

Penelitian dan Pengembangan

Kuliner

Seni

Pertunjukan

Fesyen

Kerajinan

Media Teknologi Seni dan Budaya

Musik

Desain

Ilmu Pengetahuan&

Beberapa ketentuan Penting tentang Kepariwisataan (UU 10/2009 tentang Kepariwisataan)

- 1. Menjungjung tinggi norma agama & nilai budaya (Pasal 5 ayat(a))
- Menjunjung tinggi HAM & mematuhi kode etik kepariwisataan dunia & kesepakatan internasional (Pasal 5 ayat (b) dan (g)
- Setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan (Pasal 20 ayat (b))

Thank You

A. Latar Belakang Permasalahan

Kecamatan Panimbang, Banten baru saja mengalami bencana alam tsunami. Selain tsunami, yang termasuk juga dalam bencana alam yaitu gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam merupakan peristiwa alam yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami bencana alam, tapi tidak ada seorang pun juga yang dapat menghindarinya. Namun, setiap orang dapat menghadapinya dan bangkit kembali.

Warga Huntara yang merupakan korban tsunami Kecamatan Panimbang, Banten mengalami banyak kerugian baik itu materiil maupun immateriil. Mereka harus bangkit kembali secara mental maupun materi. Secara mental mereka harus tegar menerima kenyataan, jangan berlarut-larut dalam kesedihan, jangan depresi, dan selalu positif. Secara materi, mereka harus berhemat karena telah mengalami banyak kerugian. Selain itu, mereka juga harus melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan uang yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha, dibutuhkan suatu badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum kepada Warga Huntara untuk dapat bangkit kembali setelah mengalami bencana alam tsunami, termasuk namun tidak terbatas mengenai badan usaha yang dapat mereka buat untuk melakukan kegiatan usaha.

B. Rumusan Masalah

Ada pun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1. Apa yang dapat dilakukan oleh Warga Huntara untuk bangkit kembali secara materi?
- 2. Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum apa saja yang dapat dibuat oleh Warga Huntara agar dapat melakukan kegiatan usaha?

C. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ada pun tujuan pengadian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan kepada Warga Huntara agar dapat bangkit kembali secara materi;

2. Memberikan penyuluhan hukum kepada Warga Huntara mengenai badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum apa saja yang dapat dibuat agar dapat melakukan kegiatan usaha.

D. Isi

Warga Huntara yang merupakan korban tsunami Kecamatan Panimbang, Banten mengalami banyak kerugian baik itu materiil maupun immateriil. Mereka harus bangkit kembali secara mental maupun materi, sebagai berikut:

1. Mental

Secara mental, Warga Huntara harus bangkit kembali dengan tegar menerima kenyataan, jangan berlarut-larut dalam kesedihan, dan selalu positif. Tidak ada gunanya jika mereka berlarut-larut dalam kesedihan karena tidak dapat membalikkan keadaan semula. Mereka tidak dapat mengubah masa lalu yang telah terjadi, tapi dapat mengubah masa depan dengan usaha mereka sendiri. Untuk dapat mengubah masa depan, harus dimulai dari mental yang kuat dan positif. Tentu saja diikuti dengan iman dan ibadah kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing.

2. Materi

Secara materi, Warga Huntara harus berhemat karena telah mengalami banyak kerugian. Mereka dapat memanfaatkan halaman atau tanah sekitar rumah untuk bercocok tanam, dari sayuran, rempah-rempah, biji-bijian, hingga umbi-umbian. Tumbuhan tersebut relatif cepat tumbuh, sehingga lumayan dapat membantu mereka agar dapat berhemat namun kebutuhan pangan tetap terpenuhi.

Selain itu, mereka juga harus melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan uang yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha, dibutuhkan suatu badan usaha sebagai berikut:

(a) Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum, antara lain:

1) Perusahaan Dagang (UD)

Perusahaan dagang merupakan badan usaha yang paling gampang dibuat karena pendiri hanya 1 (satu) orang sehingga tidak perlu dibuat Akta Pendiriannya di hadapan Notaris. Namun, jika kerja sama dengan perusahaan lain

biasanya dibutuhkan Akta Pendirian beserta dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat di hadapan Notaris.

2) Firma

Firma didirikan oleh sekumpulan orang yang berprofesi sama untuk kegiatan komersial. Pendiri firma minimal 2 (dua) orang. Firma yang sering ditemukan adalah kantor hukum, kantor akuntan, kantor Notaris, dan dokter.

3) Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*/CV)

Persekutuan Komanditer sebenarnya badan usaha semi Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan ada pesero pasif yang tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang dimasukkan namun juga ada pesero aktif yang bertanggung jawab penuh sampai pada harta pribadinya. Persekutuan Komanditer minimal didirikan oleh 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) pesero pemodal dan 1 (satu) pesero pengurus.

(b) Badan Usaha Berbadan Hukum, antara lain:

1) Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum yang paling umum dibuat untuk kegiatan komersial dalam skala besar. Pendiri Perseroan Terbatas minimal 2 (dua) orang. Modal yang dimasukkan ke dalam Perseroan Terbatas akan dikonversikan menjadi saham. Organ Perseroan Terbatas ada 3 (tiga), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

2) Koperasi

Koperasi harus didirikan oleh minimal 25 (dua puluh lima) orang Warga Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta berasaskan kekeluargaan. Uang yang dihasilkan dikelola bersama untuk kesejahteraan bersama para anggota koperasi yang tinggal di 1 (satu) area yang sama. Organ koperasi ada 3 (tiga), yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

3) Yayasan

Yayasan sebenarnya tidak boleh bertujuan untuk mencari keuntungan, namun banyak disalahgunakan untuk mencari keuntungan dan menghindari pajak. Organ yayasan ada 3 (tiga), yaitu Pembina, Pengawas, dan Pengurus.

Dari badan usaha yang telah disebutkan di atas, yang paling sering dibuat masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha adalah Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, dan Perseroan Terbatas.

Berikut tabel perbedaan antara badan usaha tidak berbadan hukum dengan badan usaha berbadan hukum:

	D 1 1	Badan Usaha	Badan Usaha
No.	Perbedaan	Tidak Berbadan Hukum	Berbadan Hukum
1.	Subyek	Subyek hukum dalam badan	Sejak pendiriannya disahkan,
	dan Permodalan	usaha tidak berbadan hukum	maka subyek hukum badan
		melekat pada pendiri atau	usaha berbadan hukum itu
		pengurusnya. Dengan	adalah dia sendiri sebagai
		demikian, badan usaha	personifikasi orang sebagai
		tersebut bukan merupakan	badan hukum. Oleh
		subyek hukum yang berdiri	karenanya, dia sendiri telah
		sendiri di luar pendiri atau	diakui sebagai badan hukum
		pengurus. Dalam melakukan	terpisah dari pendiri atau
		hubungan hukum dengan	pemegang saham. Dalam
		pihak ketiga, badan usaha	melakukan perbuatannya,
		tidak berbadan hukum	badan usaha berbadan hukum
		diwakilkan oleh pendiri yang	diwakilkan oleh pengurus
		sekaligus juga bertindak	atau direksi yang ditunjuk
		sebagai pengurus.	sesuai dengan Akta Pendirian
			atau Anggaran Dasar.
2.	Harta	Bercampur dengan harta	Terpisah dari kekayaan para
	(permodalan)	kekayaan pendiri atau	pendiri atau pengurus.
		pengurus.	

3.	Prosedur Pendirian	Akta Notaris dan kemudian	Ada pengesahan dari
		didaftarkan di Online Single	Kementerian Hukum dan
		Submission (OSS).	Hak Asasi Manusia terhadap
			Akta Pendirian dan
			Anggaran Dasarnya.
4.	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban akan	Pertanggungjawaban pendiri
		sampai harta pribadi pendiri	atau pemegang saham
		atau pengurus tersebut, alias	terhadap perikatan yang
		tidak ada pembatas.	dibuat antara badan usaha
			berbadan hukum dengan
			pihak ketiga sebatas modal
			yang dimasukkan ke dalam
			badan usaha berbadan hukum
			tersebut.

Semua badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum di atas, kecuali perusahaan dagang wajib membuat Akta Pendiriannya di hadapan Notaris, selaku pejabat umum pembuat akta autentik yang kekuatan pembuktiannya dipersamakan dengan putusan pengadilan di mata hukum.

E. Simpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Warga Huntara dapat bangkit kembali secara materi dengan berhemat dan melakukan kegiatan usaha. Badan usaha yang dapat dibuat untuk melakukan kegiatan usaha ada 2 (dua) macam, yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Badan usaha tidak berbadan hukum terdiri dari perusahaan dagang, firma, dan persekutuan komanditer sedangkan badan usaha berbadan hukum terdiri dari perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Badan usaha yang direkomendasikan adalah perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas.









PERJANJIAN

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR: 796-Int-KLPPM/Untar/V/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Duapuluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu duapuluh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Jap Tji Beng, Ph.D

Jabatan

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Alamat

: Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440

selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama

: Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn

Jabatan

: Dosen Tetap

: Hukum

Fakultas Alamat

: Jl. Let. Jend. S Parman No 1, Jakarta 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:

a. Nama : Yuwono Prianto, S.H., M.H.

Jabatan : Dosen Tetap

b. Nama : Viator Harlen Sinaga, S.H., M.H

Jabatan : Dosen Tetap selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "Pelatihan Kewirausahaan Hukum Bagi Warga Huntara Korban Tsunami Kecamatan Panimbang, Banten"
- (2). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada Pihak Pertama melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada Pihak Kedua sebesar Rp 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- Pencairan biaya pelaksaaan Tahap I akan diberikan setelah penandatangangan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah Pihak Kedua melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.
- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian

Pasal 2

- Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari Pihak Pertama.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni Tahun 2020

Pasal 3

- Pihak Pertama mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
- Pihak Kedua diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pihak Kedua wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan logbook.
- Laporan Kemajuan disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan logbook diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- Pihak Kedua wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- Laporan Akhir disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan Pihak Kedua memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada Pihak Kedua berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). Luaran wajib hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di Senapenmas, jurnal ber-ISSN atau prosiding internasional.
- (7). Luaran tambahan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa publikasi di media massa, HKI, dan luaran lainnya (Teknologi Tepat Guna, Model, Purwarupa (prototype), Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur), Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ISBN, dan Video Kegiatan.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PKM.
- Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Juni 2020

Pasal 5

(1). Apabila Pihak Kedua tidak mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka Pihak Pertama akan memberikan sanksi.

(2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 6

 Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

 Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.

(3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenarbenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA (Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah	
Honorarium	Rp	
Pelaksanaan kegiatan	Rp. 8.500.000,-	

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA (Rp)

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Honorarium	Rp	Rp	Rp
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp. 4.250.000,-	Rp. 4.250.000,-	Rp. 8.500.000,-
	Jumlah	Rp. 4.250.000,-	Rp. 4.250.000,-	Rp. 8.500.000,-

Jakarta, 29 Mei 2020 Pelaksana PKM

(Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn)